

JURNAL
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 223/PID.B/2014/PN.BTL)



Diajukan Oleh :

MISKE RIZKI AURIANTI

NPM : 120510991
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 223/PID.B/2014/PN.BTL)



Diajukan Oleh :

MISKE RIZKI AURIANTI

NPM	: 120510991
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 17/12/2015

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

: [Signature]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 223/PID.B/2014/PN.BTL)**

Penulis : Miske Rizki Aurianti

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : miskeauri@gmail.com

Abstract

The title of this study is "Judge Considerations In sentencing the offender of infanticide In District Court of Bantul". The background is regarding the role of the judge in determining the truth through judicial proceeding in the case of infanticide, where the main actor is the mother. Therefore, this case is different from others judge actions because generally, it has elements different from other case. The purpose of this study was to know the consideration in decisions of the judges in infanticide case number : 223/Pid.B/2014/Pn.Btl. The Type of Research is a normative legal research which the norms of positive law in the form of laws. Besides, The research requires secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The results of the thesis is to punish the offender of the infanticide. In sentencing this case the judge has considered : alternative public prosecutor indictment, prosecution of public prosecutor, evidence, the elements of Article 341 of the Criminal Code, and those things which are burdensome and ease for accused

Keywords: Judge Considerations, infanticide, Mother as offender, Article 341 of the Criminal Code.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan anak, mempunyai unsur yang tersendiri, berbeda dengan tindak pidana pembunuhan lainnya. Beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detail untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana pembunuhan anak sendiri terpenuhi, selain itu agar penegak hukum baik Polisi (Penyidik), Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim tidak salah menggunakan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa dan tidak salah pula dalam memberikan hukuman yang pantas didapatkan pelaku. Hal ini mungkin saja terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang

terjadi merupakan tindak pidana abortus atau tindak pidana pembunuhan biasa. Terkadang situasi yang terjadi menyebabkan tipisnya perbedaan yang menjadi pembeda antara tindak pidana pembunuhan anak sendiri, pembunuhan biasa, dan abortus. Dalam pembunuhan anak ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui hal – hal apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku dalam Perkara tindak pidana Pembunuhan anak dalam Perkara Nomor : 223/ Pid. B/ 2014 / Pn.Btl.

2. METODE

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma – norma yang berlaku, yaitu norma hukum positif yang berupa perundang – undangan, Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Menurut pasal 1 butir 8 KUHP Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili.

Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara diharapkan ia dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan

selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara pada putusan yang dapat dijatuhkannya yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Menurut pasal 11 butir 1 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dan pada pasal 11 butir 3 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dari Hakim adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang masuk ke Pengadilan.

Dalam KUHP telah dijabarkan tentang wewenang hakim antara lain :

a. Melakukan penahanan

Pasal 20 ayat 3 KUHP menyatakan Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

b. Pengalihan jenis penahanan

Pasal 23 ayat 1 KUHP menyatakan, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

3. Putusan Hakim

Dalam KUHAP, telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 butir 11. Ketentuan tersebut berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Adapun jenis-jenis putusan hakim yaitu:

- a. Dalam pasal 191 butir 1 KUHAP, Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Dalam pasal 191 butir 2 KUHAP, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Pasal 193 butir 1 KUHAP Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat

sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Bentuk – bentuk tindak pidana pembunuhan adalah :

a. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang menentukan sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan

lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c. Pembunuhan Berencana (Moord)
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

d. Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Permintaan Yang Sangat Tegas Oleh Korban Sendiri

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh/nyata (ernstig). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

e. Pembunuhan Tidak Sengaja
Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini

diatur dalam Pasal 359 KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang.

f. Tindak Pidana Pengguguran Kandungan

Merupakan kejahatan pembunuhan yang korbannya adalah manusia yang masih dalam bentuk janin di dalam kandung, diatur dalam :

1) Pasal 346 KUHP Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Pasal 347(1) KUHP Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3) Pasal 347 (2) KUHP Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Pasal 348(1) KUHP Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

5) Pasal 348 (2) KUHP Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

6) Pasal 349 KUHP Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal

346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

g. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Bayi atau Anak

Pembunuhan yang dilakukan terhadap korban nya yang masih bayi ataupun anak, diatur dalam :

1) Pasal 341 KUHP Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Pasal 342 KUHP Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pasal 343 KUHP Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

h. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri (menghasut, memberi pertolongan, dan upaya terhadap korban bunuh diri), diatur dalam Pasal 345 KUHP Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana

kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

3. Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak oleh ibu kandung ialah pembunuhan anak oleh ibu sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang didorong oleh ketakutan akan diketahui, bahwa ia telah melahirkan anak

Dalam hal ini tidak diperlukan, apakah si ibu ini mempunyai suami atau tidak, yang dilihat hanyalah si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Dan juga tidak diperdulikan, untuk siapa kelahiran ini harus dirahasiakan. Menurut Van Bemmelen waktu melahirkan anak ialah pada waktu si bakal – ibu mulai merasa akan melahirkan anak

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak dalam Perkara Nomor : 223 / Pid.B / 2014 / PN.BTL

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara

2. Analisis

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan surat dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan ini sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas – batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa – peristiwa yang terletak dalam batas – batas yang ditentukan surat dakwaan.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu : Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP; kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3), dan (4) tentang Undang – Undang Perlindungan Anak; ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 342 KUHP; keempat, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHP. Namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa SITI MAR'ATUN SOLIHAN ALIAS SITI BINTI MUH SOCHIB, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Anak” melanggar pasal 341 KUHP sebagaimana dalam dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu Majelis Hakim

menggunakan pasal 341 KUHP untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat – alat bukti serta barang bukti yang diajukan, Unsur – Unsur pasal 341 KUHP yang dipenuhi oleh terdakwa , serta hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan tiga alat bukti dan barang bukti yang diajukan. Tiga alat bukti tersebut yaitu : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) baju gamis dengan ciri – ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada bawah terdapat manik – manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri terdapat kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu – abu dan coklat.

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan, yang diperkuat oleh alat bukti surat berupa visum et repertum dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas kasihan II), tanggal 24 September 2014, keterangan terdakwa di persidangan yang tidak keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diperkuat pula oleh barang bukti berupa baju gamis yang dikenakan terdakwa pada saat melahirkan bayinya, maka Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Anak” melanggar pasal 341 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya .

Untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana yang

didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal 341 KUHP yang didakwakan kepadanya. Adapun unsur – unsur tersebut adalah :

- 1) Seorang ibu
- 2) Dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan.
- 3) Karena takut bahwa ia telah melahirkan anak.

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal – hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan hal – hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal. Selain itu terdakwa belum pernah di hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan Putusan dengan mempertimbangkan pasal 341 KUHP karena surat dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi dapat dipilih dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan, karena pasal 341 KUHP yang dipilih, dan dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan persidangan maka pasal 338 KUHP, pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan

Pasal 342 KUHP tidak perlu dibuktikan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menurut penulis, meskipun hukuman hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, putusan ini sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu putusan ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat mencegah warga masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana “Pembunuhan Anak”.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum / skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak dalam perkara nomor 223/ Pid.B/ 2014/ Pn. Btl, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, motif dari pelaku tindak pidana pembunuhan anak dimana pelaku merasa takut, kebingungan dan malu telah melahirkan anak hasil dari hubungan gelapnya, kondisi pelaku yang sedang ada masalah dengan rumah tangganya, dan psikologis pelaku setelah melakukan tindak pidana pembunuhan anak, yang menyesal karena telah membunuh anak kandungnya sendiri.

5. REFERENSI

Buku :

Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodoikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco Jakarta, Bandung.

Website :

http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126_Bab2.pdf; hal 22 (Diakses: Jumat, 11 September 2015; Pkl. 13.00 WIB)

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=167981> (Diakses: Jumat, 11 September 2015; Pkl. 13.00 WIB)

<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> (Diakses 12 September 2015; pkl 11.34 WIB)

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, Ali Serizawa, Apa itu Pengertian Tindak Pidana ?, (Diakses 14 september 2015 Pkl 15.32 WIB)

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>, BAB 2 Tinjauan Pustaka (Diakses 21 September 2015 Pkl. 22:49 WIB)

<http://www.santoslolowang.com/putusan-dan-jenis-jenis-putusan/>,

Mesantos Pelita Lolowang, Putusan dan Jenis – Jenis putusan (Diakses 21 September 2015; Pkl, 23:12).

<http://digilib.unila.ac.id/5420/8/BAB%20II.pdf> hlm 23-27 (Diakses: Jumat, 25 September 2015 Pkl. 12:47).

Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman